

DAFTAR PUSTAKA

- (FPPD), F. P. P. D., 2004. Rancang Bangun Bisnis dan Pengelolaan BUM Desa. In: Sukasmanto, ed. Yogyakarta: s.n.
- (PKDSP), D. P. N. P. K. D. S. P., 2007. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- berdesa.com, 2017. *Apa Saja yang Harus Ada dalam Laporan Keuangan BUMDes*. [Online] Available at: <http://www.berdesa.com/apa-saja-harus-ada-laporan-keuangan-bumdes/> [Accessed 13 Maret 2019].
- berdesa.com, 2017. *Apa Saja yang Harus Ada dalam Laporan Keuangan BUMDes*. [Online] Available at: <http://www.berdesa.com/apa-saja-harus-ada-laporan-keuangan-bumdes/> [Accessed 13 Maret 2019].
- Irawati, D., 2017. *Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan Bumdes Terhadap Pelaporan Aset Desa (Studi Fenomenologi Pada BUMDes Desa Karangbendo)*. Jember, SNAPER-EBIS 2017.
- Mahmudi, M., 2008. *Pengertian Laporan Keuangan Menurut Para Ahli*. [Online] Available at: <https://www.gurukelas.co.id/pengertian-laporan-keuangan-menurut-para-ahli-lengkap/> [Accessed 13 Maret 2019].
- Purnamasari, N., 2015. *Badan Usaha Milik Desa (Dalam Alur Regulasi)*. [Online] Available at: https://www.academia.edu/30288728/Badan_Usaha_Milik_Desa_Dalam_Alur_Regulasi [Accessed 3 Maret 2019].
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 *Badan Usaha Milik Desa*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316. Jakarta.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 *Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 *Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4587. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539. Jakarta.
- P.P.H.R.R., 2018. *Tinjauan Teoritis Laporan Keuangan BUMDes berbasis Syariah*, Volume 6 (2).
- Purnomo, J., 2016. *Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)*. Yogyakarta: s.n.

- Robert, I. W., 2007. *Financial Accounting*. China: Thomson.
- Rudini. 2014. Analisis Penerapan Sak Etap pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Langkitin di Desa Langkitin Kec. Rambah Samo Rokan Hulu. Skripsi. Universitas Pasir Pengaraian. Riau.
- Sofyan, A., 2015. *Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha Milik Desa*. [Online] Available at: <http://www.keuangandes.com/2015/09/landasan-hukum-pendirian-badan-usaha-milik-desa/> [Accessed 14 Maret 2019].
- Suciati, L., 2015. *Analisis Peranan Akuntansi pada Badan Usaha Milik Desa Sentosa Abadi di Desa Waruk, Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan*, Surabaya: Universitas Airlangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *Pemerintah Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 *Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5409. Jakarta.
- Wahyuni, E. T., 2017. Membangun Desa, Membangun Indonesia. *Peran Akuntan dalam memperkuat Bumdes*.
- Widodo, J., 2018. *Jokowi Perintahkan Laporan Dana Desa Harus Ringkas Tapi Bisa Dicek*. [Online] Available at: <https://tirto.id/jokowi-perintahkan-laporan-dana-desa-harus-ringkas-tapi-bisa-dicek-danY> [Accessed 1 Maret 2019].